

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED (CALK) TAHUN 2023



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN**  
**KELAS II BANTEN**

Jln. May.Jend Sutoyo No.21 Cilegon-Banten 42438

Telp.[0254]571083 Fax.[0254] 572491

Email:kkpbanten@yahoo.com.kespebanten@gmaill.com

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II BANTEN adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II Banten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satker KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Cilegon, 20 Januari 2023  
Kepala Kantor,



**drg Resi Arisandi, MM.,MH**  
**NIP. 197306292002121003**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Pernyataan Tanggung Jawab</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Laporan Keuangan</b>	<b>1</b>
<b>I. Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>3</b>
<b>II. Neraca</b>	<b>4</b>
<b>III. Laporan Operasional</b>	<b>5</b>
<b>IV. Laporan Perubahan Ekuitas</b>	<b>6</b>
<b>V. Catatan Atas Laporan Keuangan</b>	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	25
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	38
<b>VI. Lampiran dan Daftar</b>	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Neraca	
3. Laporan Operasional	
4. Laporan Perubahan Ekuitas	



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II  
BANTEN



Jalan Mayjen Sutoyo No.21 Kel. Gerem Kec. Gerogol Kota Cilegon 42438

Telepon : (0254) 572491, Faksimile : (0254) 572491, Email : [kospelbanten@gmail.com](mailto:kospelbanten@gmail.com)

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cilegon, 20 Januari 2023

Kepala Kantor,



**drg Resi Arisandi, MM.,MH**  
**NIP. 197306292002121003**

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II Banten Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.631.054.155,- atau mencapai 98 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.689.600.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 15.355.199.085,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.568.650.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.335.378.358,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.798.160.585,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 25.537.217.773,-; Aset Lainnya sebesar Rp 0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp. 27.335.378.358,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.624.488.505,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 16.201.455.323,- hingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai (Rp. 13.576.966.818,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.( 13.573.666.118,-) dan defisit sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 13.573.666.118,-).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 27.596.928.126,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(13.573.666.118,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 13.312.116.350,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 27.335.378.358,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR KESEHATAN PELABUHAN(KKP) KELAS II BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.689.600.000	2.631.054.155	98	4.463.209.937
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.689.600.000</b>	<b>2.631.054.155</b>	<b>98</b>	<b>4.463.209.937</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>Belanja Operasi</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	8.874.073.000	8.850.638.821	100	8.389.487.918
Belanja Barang	B.4	6.448.577.000	6.261.174.014	97	5.719.954.050
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>15.322.650.000</b>	<b>15.111.812.835</b>		<b>14.109.441.968</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Tanah		-	-	0	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5	246.000.000	243.386.250	99	3.354.773.557
Belanja Gedung dan Bangunan	B.6	-	-	0	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-		-
Belanja Modal lainnya		-	-		-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		-	-	<b>0</b>	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>15.568.650.000</b>	<b>15.355.199.085</b>	<b>99</b>	<b>17.464.215.525</b>

## II. NERACA

### KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II BANTEN NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang PNBP		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Persediaan	C.3	1.798.160.585	1.918.495.046
Jumlah Aset Lancar		<b>1.798.160.585</b>	<b>1.918.495.046</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.4	14,705,265,280	14,705,265,280
Peralatan dan Mesin	C.5	17,362,050,197	19.257.715.228
Gedung dan Bangunan	C.6	8.708.186.698	8.708.186.698
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.7	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(15.238.284.402)	(16.992.734.126)
Jumlah Aset Tetap		<b>25.537.217.773</b>	<b>25.678.433.080</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.9	-	-
Aset Lain-Lain		100.214.320	100.214.320
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(100.214.320)	(100.214.320)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>27.335.378.358</b>	<b>27.596.928.126</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang kepada Pihak Ketiga		-	-
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.11	27.335.378.358	27.596.928.126
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>27.335.378.358</b>	<b>27.596.928.126</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>27.335.378.358</b>	<b>27.596.928.126</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II BANTEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2,624,488,505	4,445,178,187
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2,624,488,505</b>	<b>4,445,178,187</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	8,850,638,821	8,389,487,918
Beban Persediaan	D.3	1,169,961,244	5,015,248,081
Beban Jasa	D.4	2,945,293,373	2,716,487,582
Beban Pemeliharaan	D.5	810,143,559	930,505,768
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,652,719,069	1,354,155,009
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	772.699.257	1.558.221.353
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>16.201.455.323</b>	<b>19.964.105.711</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
		<b>(13.576.966.818)</b>	<b>(15.518.927.524)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.565.650	18.031.750
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			54.540.000
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
		3,300,700	(36.508.250)
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>			
		<b>(13.573.666.118)</b>	<b>(15.555.435.774)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(13.573.666.118)</b>	<b>(15.555.435.774)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II BANTEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	27.596.928.126	29,314,154,397
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	<b>(13.573.666.118)</b>	<b>(15.555.435.774)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			4.875.000-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN			
MENDASAR		-	-
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASSET TETAP NON REVALUASI	E.3	-	4.875.000 -
KOREKSI ATAS PENDAPATAN		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13,312.116.350	13,807,470,588
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(261.549.768)	(1,743.090.186)
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>27,335.378.358</b>	<b>27.571.064.211</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI dengan wilayah kerja Pelabuhan Laut Bojonegara, Pelabuhan Laut Merak, Pelabuhan Laut Labuan, Pelabuhan Laut Karangantu, Pelabuhan Laut Anyer. Kantor Induk Saat berada di Jalan Mayjen Sutoyo No.21 Cilegon Banten.

Untuk mewujudkan tujuan di atas KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II Banten berkomitmen dengan visi :

Tanggung dan Prima dalam cegah tangkal faktor resiko untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di pintu gerbang negara

Untuk mewujudkan visi tersebut KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II Banten melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan laut melalui pelaksanaan cegah tangkal penyakit karantina , penyakit menular potensial wabah dan PHEIC
2. Mencegah timbulnya penyakit melalui penguatan sistem cegah tangkal penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui pelaksanaan kekarantinaan dan survailens epidemiologi, penyelenggaraan pengendalian resiko lingkungan dan upaya kesehatan pelabuhan yang sesuai dengan standar operasional prosedur
3. Memperluas akses informasi, promosi, desiminasi informasi, pembinaan jejaring kerja dan kemitraan.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan periode Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS II BANTEN.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II banten adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

(\*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing

entitas)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## Aset Tetap

### Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang Jangka Panjang*

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acarapenjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

#### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**(8) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrua  
Pertama kali*

## **(9) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp2.631.054.155,-

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2.631.054.155,- atau mencapai 98,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 2.689.600.000,-. Pendapatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten terdiri dari Pendapatan Jasad dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan (425313)	18,950,000	15,090,000	79,63
2	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan (425314)	2,299,450,000	2,471,063,505	107,46
3	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksinasi Kesehatan (425315)	371,200,000	138,335,000	37,27
4	Pendapatan Dari pemindahtanganan BMN lainnya (425129)		4,000,000	
5	Penerimaan Kembali Belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)		2,565,650	
	<b>Jumlah</b>	<b>2,689,600,000</b>	<b>2,631,054,155</b>	<b>97,82</b>

Realisasi Pendapatan Jasa sampai dengan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 97,88 persen dibandingkan Desember 2022. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan haji dan umroh telah di buka oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga banyak para jamaah umroh dan haji plus melakukan penyuntikan vaksin meningitis di KKP Banten. Regulasi Kesehatan Internasional (International Health Regulation/IHR) pun, merekomendasikan vaksinasi meningitis bagi orang-orang yang hendak bepergian ke negara-negara yang dikenal sebagai daerah epidemi dan endemis meningitis

Sehingga di tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah jamaah yang melakukan penyuntikan vaksin. Bertambahnya Volume Kedatangan kapal dari Luar negeri dan Antar pulau dalam negeri

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Desember 2023 dan Desember 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	2,624,488,505	4.463.209.937	40,25 %
Pendapatan Lain-lain	6,565,650	70.109.532	90,63 %
<b>Jumlah</b>	<b>2,631,054,155</b>	<b>4.463.209.937</b>	<b>41,05 %</b>

*Realisasi Belanja  
Negara Rp  
15.355.199.085,-*

**B.2. Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.355.199.085,- atau 99 % dari anggaran belanja sebesar Rp15.568.650.000,- . Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023*

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	% RealAngg.
Belanja Pegawai	8.874.073.000	8.850.638.821	100 %
Belanja Barang	6.448.577.000	6.261.174.014	97 %
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Belanja Modal	246.000.000	243.386.250	99 %
<b>Total Belanja Kotor</b>			
Pengembalian Belanja			
<b>Jumlah</b>	<b>15.568.650.000</b>	<b>15.355.199.085</b>	<b>99 %</b>

Dibandingkan dengan Desember 2022, Realisasi Belanja Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 11 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu anggaran tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022

2. Anggaran tahun 2023 tidak terdapat penambahan anggaran belanja modal untuk kegiatan pembangunan kantor
3. Belanja modal di tahun 2023 lebih kecil dikarenakan tidak ada anggaran Belanja Pembelian mobil Operasional dan meubeler
4. Terdapat penambahan belanja pegawai pada tahun 2023

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.850.638.821	8.389.487.918	-5%
Belanja Barang	6.261.174.014	5.719.954.050	-9%
Belanja Modal	243.386.250	3.354.773.557	93%
<b>Jumlah</b>	<b>15.568.650.000</b>	<b>17.464.215.525</b>	<b>11%</b>

*Belanja Pegawai  
Rp8.850.638.821,-*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 8.850.638.821,- dan Rp 8.389.487.918,-. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,054 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang
2. Adanya penambahan pembayaran tunjangan kinerja untuk pegawai CPNS sesuai dengan grade yang tidak di bayarkan oleh Eselon I.
3. Adanya penambahan belanja pegawai di tahun 2023
4. Adanya pegawai yang melakukan inpasing, kenaikan jabatan fungsional, KGB, kenaikan grade yang mengakibatkan kenaikan tunjangan kinerja

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,948,530,400	2.900.728.900	-2%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,047	42.743	-93593%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	241,095,040	226.958.440	-6%
Belanja Tunj. Anak PNS	79,597,082	76.253.518	-4%
Belanja Tunj. Struktural PNS	23,580,000	20.880.000	-13%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	297,405,000	272.455.000	-9%
Belanja Tunj. PPh PNS	4,086,366	4.658.876	12%
Belanja Tunj. Beras PNS	200,241,300	196.040.940	-2%
Belanja Uang Makan PNS	446,872,000	468.657.000	5%
Belanja Tunjangan Umum PNS	39,915,000	49.530.000	19%
Belanja Gaji Pokok PPPK	55,654,200		#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	606		#DIV/0!
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,565,420		#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,669,626		#DIV/0!
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,625,000		#DIV/0!
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,562,460		#DIV/0!
Belanja Uang Makan PPPK	11,248,000		#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	25,478,000	49.799.000	49%
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4,385,398,017	4.123.483.501	-6%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	74,734,356		#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.850.638.821</b>	8.389.487.918	-5%

*Belanja Barang*

*Rp 6,261,174,014,-*

#### ***B.4 Belanja Barang***

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp 6,261,174,014,- dan Rp 5.719.954.050,-. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar (0.094 %) dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkanbertambahnya anggaran belanja barang dan pelaksanaan kegiatan berasal dari pembelian mubelair wilker anyer. Pada akhir tahun dan unit eselon 1 banyakmengadakan pertemuan tatap muka

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1,441,432,219	1,185,442,366	-0.21594
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	759,100	528,200	-0.43714
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	202,222,000	180,262,000	-0.12182
Belanja Barang Operasional Lainnya	136,764,000	269,320,300	0.49218
Belanja Bahan	226,128,945	124,000	-1822.62
Belanja Honor Output Kegiatan	18,000,000	177,080,350	0.89835
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	167,189,368	138,452,176	-0.20756
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	850,386,127	233,451,755	-2.64266
Belanja Langganan Listrik	288,847,030	712,880,460	0.59481
Belanja Langganan Telepon	579,957	251,754,123	0.99769
Belanja Langganan Air	9,956,486	1,620,716	-5.1432
Belanja Keperluan Perkantoran	1,441,432,219	8,132,942	-176.23
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	759,100	128,000,000	0.9940
Belanja Jasa Profesi	2,700,000	400,000	-5.75
Belanja Jasa Lainnya	450,714,268	141,918,654	-2.1758
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	322,183,745	334,193,585	0.0359
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,855,000	13,380,000	0.7118
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	486,736,700	588,857,414	0.1734
Belanja Perjalanan Biasa	908,941,069	727,204,411	-0.2499
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	717,340,000	447,570,000	-0.602
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24,440,000	140,935,600	0.8265
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,998,000	38,444,998	0.4802
<b>TOTAL</b>	<b>6,261,174,014</b>	<b>5,719,954,050</b>	<b>-0.0946</b>

### B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp  
243,386,250,-

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 243,386,250,- dan Rp 3.354.773.557,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.75 dibandingkan Tahun 2022 dikarenakan tidak adanya pengadaan tanah dan bangunan Tahun 2023. Pada tahun 2022 terdapat belanja modal pembelian meubelair untuk wilker Anyer.

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Peralatan dan Mesin	243,386,250	992,174,853	0.7546
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2,168,098,704	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya		194,500,000	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			
Pengembalian			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>243,386,250</b>	<b>3,354,773,557</b>	<b>0.92745</b>

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin

Rp 243,386,250,-

### B.5.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp 243,386,250,- mengalami penurunan sebesar 0.75 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp 992,174,853,-. Hal dikarenakan belanja modal peralatandan mesin di tahun 2023 lebih sedikit dari thn 2022

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Desember 2022  
dan Desember 2021*

URAIAN	REALISASI SEMESTER II 2022	REALISASI SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243,386,250	992.174.853	0,75
Belanja Modal peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID 19			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>243,386,250</b>	992.174.853	0,75
Pengembalian			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>243,386,250</b>	992.174.853	0,75

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp 0,-

### **B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Pada tahun 2023 tidak ada realisasi belanja modal dan Gedung, dikarenakan pelaksanaan pembangunan belanja modal Gedung dan bangunan selesai di bangun pada bulan Nopember Tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Desember 2023  
dan Desember 2022*

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.168.098.704	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	194.500.000	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>2.362.598.704</b>	<b>0</b>
Pengembalian	0		0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>2.362.598.704</b>	<b>0</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran

Rp0,-

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- , yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
BRI No rekening 651964159501000	-	-
Kuitansi yang belum di-SP2D-kan	-	-
Uang Tunai di Brangkas	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas di Bendahara  
Penerimaan

Rp0

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BRI no rekening	Rp 0	Rp 0
Uang Tunai	Rp 0	Rp 0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>

Persediaan Rp  
1.798.160.585,-

### C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.798.160.585,- dan Rp 1.918.495.046,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Persediaan

Rincian Persediaan	
<b>Saldo Awal</b>	<b>1,918,495,046.</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Saldo Awal	1,918,495,046.
Pembelian	854,241,127.
Reklasifikasi Dari Aset	0.
Reklasifikasi Masuk	230,350,932.
Transfer Masuk	196,608,770.
<b>Mutasi Kurang</b>	
Habis Pakai	(998,177,304.)
Hasil Opname Fisik	(173,007,054.)
Reklasifikasi Keluar	(230,350,932.)
<b>Saldo Akhir 31 desember 2023</b>	<b>3,716,655,631.</b>

Persediaan	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	1.413.403.395	1.640.121.146
Suku Cadang	3.028.000	4.128.048
Persediaan Lainnya	381.729.190	5.775.888
Bahan Baku	0	268.469.928
<b>Jumlah</b>	<b>1.798.160.585</b>	<b>1.918.495.046</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp14.705.265.280,-

### C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 14.705.265.280,- dan Rp 14.705.265.280,-. Tidak terdapat kenaikan nilai

Aset.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>14.705.265.280</b>
Mutasi tambah:	0
Pembelian	-
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>14.705.265.280</b>

Peralatan dan Mesin

Rp17,362,050,197,-

### C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 17,362,050,197,- dan Rp19.257.715.228,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>19.257.715.228</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian dan transfer	243,386,250
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>17,362,050,197</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(15,238,,284,402)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>17,362,050,197</b>

Sedangkan transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

- Penambahan dari pembelian A.C Split 10 Buah Rp.55,500,000
- Penambahan dari pembelian Televisi 4 Buah Rp.23,892,000
- Penambahan dari pembelian Mic Conference 1 Buah Rp. 5,133,750
- Penambahan dari pembelian Lap Top 10 Buah Rp.144,300,000
- Penambahan dari pembelian Printer 3 Buah Rp. 6.160,500
- Penambahan dari pembelian Ccanner 2 Buah Rp.8.400,000

#### a. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Rp 8.708.186.698,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 8.708.186.698,- dan Rp 8.708.186.698,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>8.708.186.698</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang / Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>8.708.186.698</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>8.708.186.698</b>

**b. Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap**

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp15,238,284,402,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(15,238,284,402,-) dan Rp(16.992.734.126,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

Persediaan	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	14.705.265.280	-	14.705.265.280
Peralatan dan Mesin	17.362.050.197	(15,238,284,402)	19.257.715.228
Gedung dan Bangunan	8.708.186.698		8.708.186.698
<b>Jumlah</b>	<b>40.775.502.175</b>	<b>-15,238,284,402</b>	<b>40.775.502.175</b>

*Aset Tak Berwujud  
Rp 0,-*

**c. Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,. Aset tak berwujud merupakan adalah aset tetap yang umurnya lebih dari satu tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik.

**d. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Asset Lainnya**

*Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi  
Asset Lainnya Rp.(  
100,214,320),-*

Akumulasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.( 100,214,320),- dan Rp(100,214,3),- Rencana nya akan di hapuskan tahun 2024 ini yaitu peralatan dan mesin

Persediaan	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan mesin	100,214,320	100,214,320	100,214,320

Jumlah	100,214,320	100,214,320	100,214,320
--------	-------------	-------------	-------------

*Ekuitas*

*Rp27.335,378,358,-*

**e. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 27,335,378,358,- dan Rp 27.596.928.126,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.



## a. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP

Rp

2,624,488,505,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 2,624,488,505,- dan Rp 4.463.209.937,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	DESEMBER 2023	DESEMBER 2022	NAIK/ TURUN %
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	15.090.000	113.055.000	87%
Pendapatan jasa karantina Kesehatan	2.299.450.000	2.499.935.405	8%
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	371.200.000	1.780.110.000	79%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		52.077.782	
<b>Jumlah</b>	<b>2.624.488.505</b>	<b>4.445.178.187</b>	<b>41%</b>

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan Jasa Turun sebesar 41 % dibandingkan dengan tahun 2022 Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan Sensor karantina Menurun, dan kegiatan umroh tidak diwajibkan lagi vaksin meningitis. Sehingga banyak para jamaah umroh dan haji plus tidak melakukan penyuntikan vaksin meningitis di KKP Banten. Regulasi Kesehatan Internasional (International Health Regulation/IHR) pun, biarpun merekomendasikan vaksinasi meningitis bagi orang-orang yang hendak bepergian ke negara-negara yang dikenal sebagai daerah epidemid endemis meningitis seperti Arab Saudi, Nepal, Kenya dan daerah lingkaran meningitis di Sub-Sahara Afrika. Sehingga di tahun 2023 terdapat Penurunan jumlah jamaah yang melakukan penyuntikan vaksin

Beban Pegawai Rp

8.850,638,821,-

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 8.850.638.821,- dan Rp 8.389.487.918,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rincian Beban Pegawai untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	DESEMBER 2023	DESEMBER 2022	NAIK %
Beban Gaji Pokok PNS	2,947,952,300	2,900,728,900	-2%
Beban Pembulatan Gaji PNS	39,982	42,743	6%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	241,037,230	226,958,440	-6%
Beban Tunj. Anak PNS	79,573,958	76,253,518	-4%
Beban Tunj. Struktural PNS	23,580,000	20,880,000	-13%
Beban Tunj. Fungsional PNS	297,405,000	272,455,000	-9%
Beban Tunj. PPh PNS	4,086,366	4,658,876	12%
Beban Tunj. Beras PNS	200,241,300	196,040,940	-2%
Beban Uang Makan PNS	446,872,000	468,657,000	5%
Beban Tunjangan Umum PNS	39,915,000	49,530,000	19%
Beban Gaji Pokok PPPK	55,654,200		#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	606		#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,565,420		#DIV/0!
Beban Tunjangan Anak PPPK	1,669,626		#DIV/0!
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5,625,000		#DIV/0!
Beban Tunjangan Beras PPPK	4,562,460		#DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	11,248,000		#DIV/0!
Beban Uang Lembur	25,478,000	49,799,000	49%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	4,385,398,017	4,123,483,501	-6%
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Ki nerja PPPK	74,734,356		#DIV/0!
<b>JUMLAH</b>	<b>8.850.638.821</b>	<b>8.389.487.918</b>	<b>5.497</b>

Beban Persediaan  
Rp 1,169,961,244,-

## D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1,169,961,244,- dan Rp 5,015,248,081,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	DESEMBER 2023	DESEMBER 2022	NAIK %
Beban Persediaan konsumsi	1,016,460,945	4,345,576,458	77%
Beban Persediaan suku cadang			#DIV/0!
Beban Persediaan bahan baku	38,245,716	231,474,072	83%
Beban Persediaan Lainnya	115,254,583	438,197,551	74%
<b>Jumlah</b>	<b>1,169,961,244</b>	<b>5,015,248,081</b>	<b>77%</b>

Beban Barang dan

Jasa Rp.2.945,293,373,-

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.945,293,373,- dan Rp 2.716.487.582,-

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa yang merupakan konsumsi atas barang dan/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Rincian beban barang dan jasa untuk tahun 2023 dan 2022.

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,441,432,219	1,185,442,366.	-22%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	759,100	528,200.	-44%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	202,222,000	180,262,000	-12%
Beban Barang Operasional Lainnya	136,764,000	269,320,300.	49%
Beban Bahan	226,128,945	177,080,350.	-28%
Beban Honor Output Kegiatan	18,000,000		#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	167,189,368	138,452,176.	-21%
Beban Langganan Listrik	288,847,030	251,754,123	-15%
Beban Langganan Telepon	579,957	1,620,716.	64%
Beban Langganan Air	9,956,486	8,132,942.	-22%
Beban Jasa Profesi	2,700,000	400,000.	-575%
Beban Jasa Lainnya	450,714,268	141,918,654	-218%
Beban Sewa		128,000,000	100%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		124.000	100%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		233.451.755	#VALUE!
<b>Jumlah</b>	<b>2.945,293,374</b>	<b>2,716,487,582</b>	<b>-8%</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp  
810,143,559,-

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 810,143,559,- dan Rp 930.505.768,-

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	322,183,745	334.193.585	4%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	486,736,700	588.857.414	17%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,223,114	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan		0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>810,143,559</b>	<b>930.505.768</b>	<b>13%</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp1.652,719,069,-

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1,652,719,069,- dan Rp1.354.155.009,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	908,941,069	727.204.411	-25%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	717,340,000	447.570.000	-60%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	24,440,000	38.444.998	36%
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19		140.935.600	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	1,998,000		
<b>Jumlah</b>	<b>1,652,719,069</b>	<b>1.354.155.009</b>	<b>22 %</b>

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
sebesar Rp  
772,699,257,-

#### D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 772,699,257,- dan Rp1.558,221,353,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	673,171,239	1,383,100,350.	51%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99,528,018	176,030,088.	43%
Beban Amortisasi Software	0		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>772,699,257</b>	<b>1,558,221,353</b>	<b>50%</b>

Surplus /Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp  
(36.508.250,-)

## D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Pengembalian Belanja	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,300,700	18.031.750	82%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		54.540.000	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>3,300,700</b>	<b>(36.508.250)</b>	<b>109%</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp  
27,596,928,126,-*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 27,596,928,126,- dan Rp 29.314.154.397,-

*Defisit LO*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

*(Rp13,573,666,118,-)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(13,573,666,118,-) dan Rp(15,555,435,774,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar  
Entitas*

### E.3 Transaksi Antar Entitas

*Rp13.312,116,350,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp13.312,116,350,- dan Rp 13,807,470,588,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>NILAI</b>
Diterima dari Entitas Lain	2,631,054,155
Ditagihkan ke Entitas Lain	15,355,199,085
Transfer Masuk	587,971,420
Transfer Keluar	0
<b>JUMLAH</b>	<b>13.312,116,350</b>

*Ekuitas Akhir  
Rp27.335,378,358,-*

### E.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 27.335,378,358,- dan Rp 27,571,064,221,-

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten tidak ada kejadian yang penting setelah tanggal neraca

### **TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK TEMUAN BPK**

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten tidak ada temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK per tanggal 31 Desember 2023

#### **F.4 REKENING PEMERINTAH**

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten Adalah

Bank BRI Cabang Cilegon No. Rek. 651964159501000

#### **F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi pada tanggal 01 Nopember 2023 terdapat penggantian Pejabat Pengelola Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran : drg. Resi Arisandi, MM, MH  
Pejabat Pembuat Komitmen : Endang Syarifatul Anwar,SKM.M.Epid  
PPSPM : Casam,S.Sos  
Bendahara Pengeluaran : Andriani Suatrimin Akib, SE  
Bendahara Penerimaan : M Nurfaizi, SE  
Petugas SAI : Erwin Rahman,SE  
Petugas SIMAK BMN : Elisabeth Lioni